

The Influence Of Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Fund And Special Allocation Fund On Capital Expenditure Budget Allocation (Empirical Study On Regency And City Governments Throughout Indonesia In 2018-2021)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Indonesia Tahun 2018-2021)

Muhammad Puji Prawiroyudo^{1*}, Saring Suhendro²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung^{1,2}
mpuji24@gmail.com¹, saring.suhendro@feb.unila.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of economic growth, local revenue, general allocation funds and special allocation funds on the allocation of the capital expenditure budget. The sampling technique used in this research was purposive sampling. The type of data used is secondary data. The type of research used is quantitative research with data collection techniques, namely the Regional Revenue and Expenditure Budget Report (APBD) obtained from the Directorate General of Financial Balance and the Supreme Audit Agency (BPK) regarding Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Capital Expenditures and for Economic Growth (GRDP), data was obtained from the Central Statistics Agency for all regencies/cities in Indonesia for 2018-2021. The data analysis technique in this research was carried out using the SPSS26 method. The research results show that there is no positive influence between economic growth and capital expenditure. Meanwhile, local revenue, general allocation funds and special allocation funds have a positive effect on capital expenditure.

Keywords: Capital Expenditure, Economic Growth, Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal serta untuk Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), data diperoleh dari Badan Pusat Statistik seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018 - 2021. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang biasanya diukur dengan tingkat pendapatan riil perkapita (Suparmoko dalam Barimbing & Karmini, 2015). Infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi, persiapan infrastruktur yang baik maka akan meningkatkan produktivitas (Wayan *et al.*, 2017). APBD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintah daerah diberi kewenangan memungut pajak atau retribusi dan mengelola berbagai

Sumber Daya Alam dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas desentralisasi. pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK), pinjaman daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan merupakan sumber dana daerah. Pemerintah daerah mengelola langsung tiga sumber pertama melalui APBD, sedangkan pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengelola sumber sisanya.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018-2021 merupakan gambaran langkah konkrit yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanannya. Berikut tabel ringkasan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota se-Indonesia tahun 2018-2021.

Berikut tabel dari Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota 2018-2021 :

Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota 2018-2021

Indikator (<i>Indicator</i>)	Anggaran APBD (Miliar)			
	2018	2019	2020	2021
PAD Pemerintah Kabupaten/Kota <i>Local Own-Source Revenue</i>	269.908	295.522	328.418	310.168
Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Fund</i>	401.489	421.340	384.381	377.791
Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Fund</i>	62.436	69.326	53.787	63.648
Belanja Modal <i>Capita Expenditure</i>	223.655	238.368	236.668	196.815
Pertumbuhan PDB 2019/ <i>Growth of GDP 2018</i> : 5,17% Pertumbuhan PDB 2019/ <i>Growth of GDP 2019</i> : 5,02% Pertumbuhan PDB 2020/ <i>Growth of GDP 2020</i> : -2,07% Pertumbuhan PDB 2021/ <i>Growth of GDP 2021</i> : 3,69%				

Sumber : (*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan / Kementerian Keuangan, n.d.*)

Pemerintah daerah dituntut menjadi penggerak utama dalam perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Sebagai acuan secara nasional laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 tercatat sebesar 5,17 persen dan pada tahun 2019 tercatat sebesar 5,02 persen. Pemerintah menghadapi tantangan baru di tahun 2020. Indonesia mengalami tantangan berat yaitu pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung memengaruhi kegiatan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,07 persen.

Pemerintahan kabupaten dan kota seluruh Indonesia yang terdiri dari 415 kabupaten dan 93 kota dalam kurun tahun 2018-2021 proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) daerah masih sangat tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah pada pasokan dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan tidak stabilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Indonesia terhadap anggaran.

Pemulihan ekonomi diharapkan berjalan secara efektif, sehingga pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus dan serius dalam penanganan kasus Covid-19 dengan cara meningkatkan kemandirian daerah dalam peranan pendapatan asli daerah. Dalam APBD, pendapatan asli daerah dianggap sebagai sumber pembiayaan utama akibatnya pemerintah

daerah perlu menggali potensi di luar pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan rasio pertumbuhan ekonomi dalam struktur APBD, diharapkan akan lebih baik lagi pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, maka semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Sugiyanta, 2016).

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan proporsi belanja daerah yang ditunjukkan untuk belanja modal sebagai stimulus pembangunan. Belanja modal itu sendiri ditambah belanja barang dan jasa, ialah belanja pemerintah yang diharapkan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya, maka semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasionya, maka semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudika & Budarta (2017) yang meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus pada belanja modal provinsi Bali. Meianto *et al.* (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Selatan pada tahun 2012-2013. Priambudi (2017) yang melakukan penelitian pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2013.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* menggambarkan situasi dimana pengelolaan didalam pemerintah lebih mementingkan tujuan kepentingan organisasi dan tidaklah termotivasi oleh tujuan individu. Teori tersebut menjelaskan bahwa ada hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan organisasi. Kesuksesan organisasi mencerminkan maksimalisasi utilitas kelompok principal dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Donaldson & Davis, 1991).

Implikasi teori *Stewardship* dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya masyarakat, dapat menerima aspirasi masyarakat, memaksimalkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap keuangan yang diberikan kepadanya, sehingga target ekonomi dapat tercapai serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam teori keagenan terdapat dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang yang disebut prinsipal dan pihak yang menerima wewenang yang disebut agen. Hubungan principal dan agen terjadi ketika tindakan yang dilakukan seseorang memiliki pengaruh kepada orang lain atau ketika seseorang sangat bergantung kepada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diciptakan pada kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak. Teori agensi lebih sering dibahas dalam konteks manajemen perusahaan yang berorientasi pada bisnis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan susunan/rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan sebagai peraturan daerah. Anggaran daerah ialah salah satu peran yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik yang mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerahnya. Mengingat peran APBD sangat penting karena APBD sebagai alat untuk pendorong atau penentu tercapainya target ekonomi dan sarana makro ekonomi daerah dan untuk mengatasi permasalahan dan kenadala yang terjadi di masyarakat yang merupakan suatu tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas program pembangunan tahunan.

Pertumbuhan Ekonomi

Ukuran yang terpenting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan PDRB sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Dalam pemerintahan daerah, pembangunan sarana dan prasarana berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Dapat disimpulkan bahwa perbaikan dan peningkatan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah itu. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah untuk memenuhi belanjanya terutama untuk belanja modal. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Bila disesuaikan dengan Teori Agensi Jensen & Meckling (1976), hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Pendapatan asli daerah tercermin dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal, sedangkan belanja modal itu sendiri merupakan salah satu sumber pembiayaannya dari Pendapatan asli daerah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan disalurkan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum menunjukkan bahwa daerah miskin dan tertinggal harus menerima lebih banyak dari pada daerah yang kaya (Kuncoro, 2014). Transfer DAU yang berasal pemerintah pusat dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana melalui alokasi anggaran belanja modal, dengan meningkatnya pelayanan publik diharapkan pula dapat mendorong peningkatan terhadap pendapatan masyarakat.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang diberikan untuk daerah dari pengalokasian pendapatan APBN untuk membiayai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional di daerah tersebut.

Penelitian Febriana dan Praptoyo (2015) menemukan bahwa DAK berpengaruh secara positif alokasi belanja modal.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: Teori Stewardship mengasumsikan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Teori keagenan memiliki hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah akan mengalokasikan belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Masyarakat sebagai pihak *principal* juga akan melakukan produktivitas ekonomi dalam suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri.

Menurut penelitian Ayem & Pratama (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dengan begitu maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Hubungan teori *Stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan bahwa keberadaan Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Masyarakat sebagai pihak *principal* telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku *agent* sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Novitasari (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dengan begitu maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Hubungan teori *Stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan bahwa keberadaan pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Kegiatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini dapat menambah alokasi belanja daerah untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang diberikan kepada daerah dari pendapatan APBN untuk tercapainya pemerataan dalam hal financial antara daerah satu dengan lainnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2018) menunjukkan bahwa DAU memengaruhi alokasi belanja modal secara positif. Dengan begitu maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

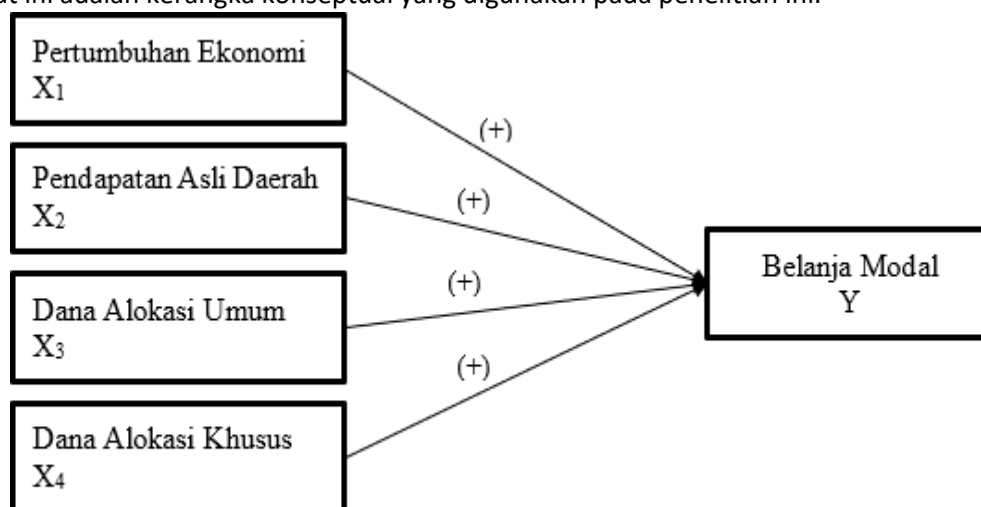
H3 : Perubahan DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Hubungan teori *Stewardship* dengan penelitian ini yaitu, dimana terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintahan daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, peningkatan, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan mengarahkan pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang dialokasikan dalam belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (Situngkir, 2009) Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.. Dengan begitumaka hipotesis pada penelitian ini adala sebagai berikut:

H4 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori (*explanatory research*). Jenis data pada penelitian ini ialah data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data ialah teknik dokumentasi. Populasi dari penelitian ini, yaitu Pemerintahan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, terdiri atas 415 Kabupaten dan 93 Kota dengan total 508 Kabupaten/Kota di Indonesia dan data yang digunakan bersumber dari Tahun 2018-2021. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

- Pengalokasian Belanja Modal

2. Variabel Independen

- Pertumbuhan Ekonomi
- Anggaran Pendapatan Ali Daerah
- Anggaran Dana Alokasi Umum
- Anggaran Dana Alokasi Khusus

3. Hasil Dan Pembahasan

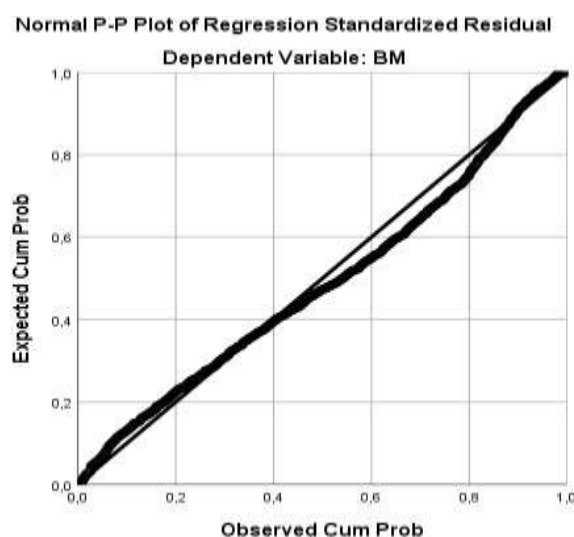
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		2032
Normal Parameters	Mean	.0000000

	Std. Deviation	.48224
Most Extreme	Absolute	.020
Differences	Positive	.015
	Negative	-.018
Test Statistic		.018
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction		
Sumber: Output SPSS 26, 2023		

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,069 > 0,05$, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi telah terdistribusi secara normal. Sehubungan dengan uji normalitas, peneliti juga akan menggunakan analisis grafik normal plot.



Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas Probability Plot

Gambar di atas menunjukkan bahwa persebaran data menyebar di dekat garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonearitas

Coefficients ^a				
Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	PE	.990	1.010	Tidak ada gejala multikolinearitas
	LN_PAD	.644	1.553	Tidak ada gejala multikolinearitas
	LN_DAU	.304	3.284	Tidak ada gejala multikolinearitas
	LN_DAK	.326	3.068	Tidak ada gejala multikolinearitas
a. Dependent Variable: LN_BM				

Sumber: Output SPSS 26, 2023

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

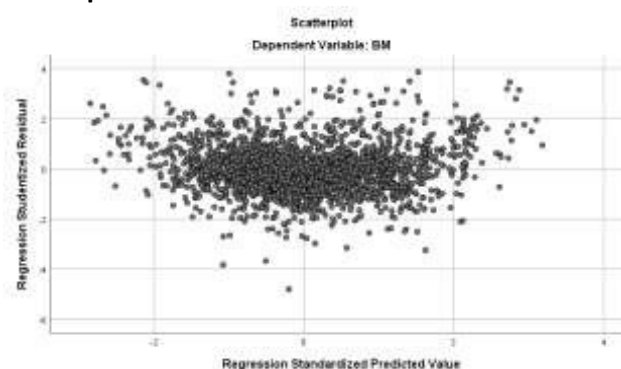
Model	Durbin-Watson
1	2,026
a. Predictors: (Constant), LN_DAK, PE, LN_PAD, LN_DAU	
b. Dependent Variable: LN_BM	

Sumber: Output SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel diatas Nilai Durbin-Watson berada di antara nilai dU dengan 4-dU, yaitu $1.93049 < 2,026 < 2,06951$ (4- dU). Dengan demikian, data penelitian terbebas dari gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedasitas

Hasil Uji Heteroskedasitas Spearman's Rho



Gambar 3. Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS 26, 2023

Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, persebarannya juga merata. Sehingga disimpulkan dari hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Selain itu, pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji park.

Tabel 4. Hasil Uji Park

<i>Coefficients^a</i>					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-2,985	1,014		-2,945
	PE	,002	,009	,005	,221
	LN_PAD	,073	,057	,104	1,281
	LN_DAU	,216	,257	,034	,843
	LN_DAK	-,505	,479	-,100	-1,054
a. Dependent Variable: LN2_RES					

Sumber: Output SPSS v.26, hasil olah data peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai β pada hasil uji park tidak signifikan. Dengan demikian, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.267	.182		12.434	.000
	PE	.001	.002	.014	.815	.415
	LN_PAD	.163	.010	.345	15.880	.000
	LN_DAU	.129	.046	.088	2.790	.005
	LN_DAK	.320	.035	.279	9.138	.000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS 26, 2023

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum Squares	of df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	238.685	4	59.671	316.531	.000b
	Residual	382.123	2027	.189		
	Total	620.809	2031			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), LN_DAK, PE, LN_PAD, LN_DAU

Sumber: Output SPSS 26, 2023

Uji Parsial (Uji t)

Hipotesis 1 : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
 Hipotesis 2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
 Hipotesis 3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
 Hipotesis 4 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 ^a	.384	.383	.43419

a. Predictors: (Constant), LN_DAK, PE, LN_PAD, LN_DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS 26, 2023

Koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan dari seluruh variabel independen (X) yang terdapat dalam model regresi terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,383. Hal ini berarti bahwa 38,3 Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya sebesar 61,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pembahasan

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama, Berdasarkan penjabaran data di atas, khususnya uji hipotesis maka diperoleh Nilai $Sig = 0,415 > 0,05$, dan nilai t hitung sebesar 0,815 maka H_1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Adiwiyana (2011) dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua, Berdasarkan penjabaran data di atas, khususnya uji hipotesis maka diperoleh Nilai $Sig = 0,000 < 0,05$, dan nilai t hitung sebesar 15,880 maka H_2 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian Sari dan Novitasari (2017), yang memiliki hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hipotesis ketiga, Berdasarkan penjabaran data di atas, khususnya uji hipotesis maka diperoleh Nilai $Sig = 0,005 < 0,05$, dan nilai t hitung sebesar 2,790 maka H_3 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudika dan Budiarta (2017) dikatakan bahwa hasil Dana Alokasi Umum berbanding lurus dengan belanja modal, artinya semakin tinggi belanja modal yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula belanja modal yang akan dapat dialokasikan pada daerah tersebut.

Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hipotesis keempat, Berdasarkan penjabaran data di atas, khususnya uji hipotesis maka diperoleh Nilai $Sig = 0,000 < 0,05$, dan nilai t hitung sebesar 9,138 maka H_4 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian Situngkir (2009), yang memiliki hasil bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

5. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat pengaruh yang positif antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.
2. Terdapat pengaruh yang positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
3. Terdapat pengaruh yang positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
4. Terdapat pengaruh yang positif antara variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dapat diajukan saran-saranyang ditujukan kepada:

1. Peneliti selanjutnya disarankan dalam untuk menambahkan tahun penelitian terbaru sehingga akan menunjukkan perbedaan penelitian setelah Covid-19.
2. Untuk akademik, penelitian ini mampu dijadikan sebagai referensi khusus dibidang kajian yang membahas tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan menambah variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Seperti contohnya variabel SILPA dan Dana Bagi Hasil.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2168571>
- Adiwiyan, Priya. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Fakultas Ekonomu Universitas Diponogoro.
- Agung, A. A. P. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UB Press.
- Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/10.1177/0951692890002003005>
- Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE.
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2020). *Research Methods for Business* (8th ed.). John Wiley & Sons Inc.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4 Edition. London: Sage.
- Dewi, N. I., & Citra, M. F. (2021). The Impact on Economic and Environmental Development of COVID-19 Pandemic: a Case Study In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 1–11. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan / Kementerian Keuangan. (n.d.). Retrieved January 29, 2023, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49– 64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>.
- Febriana, I. S., & Praptoyo, S. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans (JIRA)*, 4(9).
- Garba, Sunusi., Mudzamid bin Mohamed. (2018). Ownership Structure and Profitability: The Moderating Effect of Audit Committee Financial Expertise. *The Journal of Social Sciences Research*.
- Ghozali, H. I. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. In *International Journal of Physiology* (3rd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.).
- Gujarati, D. N. (1999). *Essentials of Econometrics*. McGraw-Hill.
- Hagen, J. Von. (2003). *Budgeting Institutions And Public Spending*. 1–39.
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. *KINERJA*, 14(2), 85–91. <https://doi.org/10.30872/JKIN.V14I2.2483>.
- Istighfarin, Diana., Wirawati, Ni Gusti Putu. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance

Terhadap Profitabilitas Pada Badan Usaha Milik Negara

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2021, January 1). *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Desember 2020*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
- Kolinug, M. S., Ilat, V. I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 818–830. <https://doi.org/10.35794/EMBA.3.1.2015.7556>.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=347827>.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi daerah : Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19168>.
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007–2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci (Sampel halaman)*. Nanang Martono.
- Meianto, E., Dhia Wenny, C., Multi Data Palembang, S., Rajawali No, J., Akuntansi, J., Kunci, K., Alokasi Umum, D., Alokasi Khusus, D., & Asli Daerah Luas Wilayah dan Belanja Modal, P. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. 2012–2013.
- Nugroho, B. A. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=482838>.
- Onifade, O. C., & Olanrewaju, S. O. (2020). Investigating Performances of Some Statistical Tests for Heteroscedasticity Assumption in Generalized Linear Model: A Monte Carlo Simulations Study. *Open Journal of Statistics*, 10(03), 453–493. <https://doi.org/10.4236/ojs.2020.103029>.
- Palupi, F. A. D. (2018). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal*. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/563>.
- Pealeu, A. M. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1189–1197. <https://doi.org/10.35794/EMBA.1.4.2013.2892>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/ Tahun 2013 tentang *Bagan Akun Standar [BPK RI]*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah [BPKRI]*. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan [BPK RI]* (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 136–147. <https://doi.org/10.21831/Nominal.V6I1.14338>.
- Sari, D. G. Y. A., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali. *KRISNA: Kumpulan Riset*

- Akuntansi*, 9(1), 15–29. <https://doi.org/10.22225.KR.9.1.325.15-29>.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Edisi 1). Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Sekaran Uma, B. R. (1992). Research Method in Business. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–447.
- Situngkir, A. (2009). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara*.
- Solikin, I. (2010). Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Jawa Barat. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 1(2), 165–178. <https://doi.org/10.17509/JASET.V1I2.9927>.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1689–1718. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.V21.I02.P30>.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 19–40. <https://doi.org/10.19184/JAUJ.V14I1.2504>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta: Bandung.
- Suparmoko dalam Barimbing, Y. R., & Karmini, N. L. (2015). Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 434–450.
- The SMERU Research Institute. (n.d.). Retrieved January 29, 2023, from <https://smeru.or.id/>.
- Wayan, N., Dewi, R., Gede, D., & Suputra, D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1745–1773.
- Wertianti, I. G. A. G. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD Dan DAU Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 567–584.